



Article Informations
Corresponding Email:
sarahsitaliya694@gmail.com

Received: 13/05/2026; Accepted:
03/05/2026; Published: 30/06/2026

PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI SEKTOR JUDI ONLINE KOTA SIHANOUKVILLE, KAMBOJA

Sarah Siti Aliya

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Fenomena meningkatnya pekerja migran ilegal Indonesia di sektor judi online di Kota Sihanoukville, Kamboja, merupakan isu transnasional yang melibatkan perekrutan dan eksploitasi oleh sindikat kriminal internasional, memanfaatkan celah migrasi ilegal dan lemahnya pengawasan lintas negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran International Organization for Migration (IOM) dalam penanggulangan permasalahan tersebut dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis dokumen dan data sekunder dari sumber kredibel. Hasil menunjukkan IOM berperan dalam advokasi, fasilitasi kerja sama, repatriasi korban, dan bantuan reintegrasi sosial-ekonomi. Peran ini membantu penyelamatan dan pemulangan korban, meski terkendala sumber daya, perbedaan hukum, dan koordinasi. Penelitian menyimpulkan perlunya sinergi lebih kuat antarnegara untuk melindungi WNI.

Kata Kunci: International Organization for Migration, pekerja migran ilegal, judi online, Kamboja, perlindungan WNI

Abstract

The increasing incidence of illegal Indonesian migrant workers in the online gambling sector in Sihanoukville, Cambodia, constitutes a complex transnational challenge involving recruitment and exploitation by international criminal syndicates. These syndicates exploit regulatory gaps in migration governance and weaknesses in cross-border oversight. This study examines the role of the International Organization for

Migration (IOM) in addressing this issue and formulates policy recommendations to strengthen protection mechanisms. Adopting a qualitative descriptive design with a case study approach, the research utilizes document analysis and secondary data from credible sources. The findings reveal that the IOM plays a pivotal role in advocacy, facilitating intergovernmental cooperation, coordinating the repatriation of victims, and supporting their socio-economic reintegration. Despite these contributions, the organization faces persistent challenges related to limited resources, legal discrepancies, and coordination barriers. The study concludes that enhancing inter-state collaboration and institutional synergy is critical to safeguarding the rights and welfare of Indonesian citizens abroad.

Keywords: *International Organization for Migration, illegal migrant workers, online gambling, Cambodia, protection of Indonesian citizens*

PENDAHULUAN

Migrasi ilegal telah menjadi isu global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya mobilitas manusia lintas batas negara. Pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain tidak hanya disebabkan oleh keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, tetapi juga didorong oleh tekanan struktural yang terjadi di negara asal. Migrasi internasional ini dipicu oleh beberapa faktor salah satunya yaitu kemiskinan, pengangguran dan minimnya lapangan kerja di negara asal, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang layak mendorong masyarakat untuk mencari penghidupan di luar negeri, meskipun dengan cara yang tidak sesuai prosedur atau tanpa dokumen resmi.¹ Hal ini menjadi permasalahan yang serius karena semakin banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban eksploitasi, seperti kerja paksa hingga perdagangan organ dan pelanggaran-pelanggaran berat lainnya yang melanggar hak asasi manusia.²

Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak kasus warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja secara ilegal yang dalam sektor judi online, khususnya

¹ Jesica Wulan Oroh, "Peran BP2MI Dalam Pencegahan Penempatan Pekerja Migran Ilegal Melalui Program Satuan Tugas Pemberantasan Pekerja Migran Ilegal Indonesia Di Era Covid-19," *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 81–94.

² Putri Injilia Wangko et al., "Peran Imigrasi Manado Dalam Mencegah Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural Ke Kamboja" 17, no. 3 (2025): 108–18.

di kota Sihanoukville, Kamboja. Kota Sihanoukville atau lebih dikenal dengan nama Kampong Som, merupakan sebuah kota yang ada di pesisir bagian barat daya Kamboja. Pada awalnya kota Sihanoukville ini merupakan sebuah destinasi wisata yang cukup populer karena pantainya yang indah. Namun dalam satu dekade terakhir, citra Sihanoukville mengalami pergeseran drastis. Investasi asing, terutama dari Tiongkok, mendorong munculnya ratusan kasino, hotel, dan perusahaan teknologi perjudian daring (online gambling). Kota ini kemudian berkembang menjadi pusat industri judi online terbesar di Kamboja.

Pemerintah Kamboja telah menunjukkan komitmen dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia melalui penerapan berbagai regulasi dan kebijakan hukum, penerapannya di tingkat lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan yang tidak dapat diabaikan. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hun Manet, pemerintah menegaskan kesungguhan untuk menegakkan prinsip supremasi hukum dan menjunjung hak asasi manusia, serta mengakui keberadaan persoalan perdagangan manusia di dalam negeri, tetapi terdapat berbagai kendala struktural dan budaya yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut, kendala itu mencakup keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, minimnya sumber daya, kurangnya partisipasi dari aktor-aktor lokal, serta konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan korban ³

Fenomena yang sangat mencolok yaitu jumlah WNI yang menjadi korban eksploitasi di kota Sihanoukville, Kamboja, dalam sector judi online sangat meningkat. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan pada bulan Mei 2023 bahwa pemerintah Indonesia telah memulangkan sekitar 1.138 warga negara Indonesia yang menjadi korban eksploitasi, yang bekerja pada perusahaan situs judi online dan online scam di Kamboja.⁴ WNI yang menjadi korban eksploitasi itu sebagian besar direkrut melalui media sosial dan agen -agen ilegal.

³ Nhek Sreyleak, "PM Vows to Combat Human Trafficking, Warns Against Fake News," 2024, <https://cambodianess.com/article/pm-vows-to-combat-human-trafficking-warns-against-fake-news>.

⁴ Arief Febriansyah Sugiyono and Arthur Josias Simon Runturambi, "Memerangi Cybercrime Dan TPPO Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural Ke Kamboja," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* | 7, no. 1 (2024): 2–12, <https://10.0.205.137/jikk.v7i1.544>.

Kasus-kasus tersebut menjadi bukti bahwa kejahatan perdagangan manusia tidak hanya terjadi karena faktor ekonomi dan sosial di negara asal, namun juga karena lemahnya pengawasan dan kerangka hukum di negara tujuan. Dalam kasus ini, perlindungan terhadap WNI tidak cukup hanya dilakukan oleh negara melalui pendekatan bilateral, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktor non-negara dan organisasi internasional yang memiliki kapasitas dalam penanganan migrasi dan perlindungan korban. Salah satu organisasi yang memiliki peran strategis dalam isu ini adalah *International Organization for Migration* (IOM).

International Organization for Migration (IOM) adalah organisasi antarpemerintah yang didirikan pada tahun 1951 dan menjadi bagian dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2016. IOM memiliki mandat utama untuk mempromosikan migrasi yang manusiawi dan tertib demi kepentingan semua pihak, termasuk migran dan negara. Organisasi ini terlibat dalam berbagai isu yang berkaitan dengan migrasi, termasuk bantuan darurat, pembangunan kapasitas, perlindungan hak-hak migran, hingga pencegahan perdagangan manusia. IOM juga bekerja sama dengan berbagai negara untuk mengelola tantangan migrasi dan memaksimalkan dampak positif dari migrasi itu sendiri.⁵ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara bulat mengesahkan Resolusi A/RES/70/296, yang menetapkan *International Organization for Migration* (IOM) sebagai *related organization* dalam sistem PBB.⁶ Penetapan ini memperkuat kerangka kerja sama antara IOM dan PBB, terutama dalam penanganan isu-isu migrasi internasional, pengungsi, dan perdagangan manusia. Penandatanganan resmi perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan Direktur Jenderal IOM pada 19 September 2016.⁷

⁵ International Organization for Migration (IOM), *About IOM*, <https://www.iom.int/about-iom>, diakses pada 3 Juli 2025.

⁶ United Nations General Assembly, *Resolution Adopted by the General Assembly on 25 July 2016: Agreement concerning the Relationship between the United Nations and the International Organization for Migration (A/RES/70/296)*, [online] Available at: <https://digitallibrary.un.org/record/837208>

⁷ United Nations, "UN and IOM Sign Historic Agreement," *UN News*, 19 September 2016. Available at: <https://news.un.org/en/story/2016/09/539722>

International Organization for Migration (IOM) bukan merupakan badan di bawah langsung Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), namun memiliki hubungan kerja yang erat dan status pengamat (*observer status*) di dalamnya. IOM diberikan status pengamat oleh ECOSOC sejak tahun 1992, yang memungkinkan IOM untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ECOSOC dan memberikan kontribusi dalam pembahasan isu-isu sosial, ekonomi, dan pembangunan yang berkaitan dengan migrasi internasional.⁸

Sebagai organisasi internasional yang fokus pada isu migrasi, IOM sering bekerja sama dengan ECOSOC dalam kerangka pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*2030 Agenda for Sustainable Development*), khususnya dalam tujuan yang berkaitan dengan migrasi yang aman, tertib, dan reguler. Selain itu, IOM juga terlibat dalam High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) yang diselenggarakan oleh ECOSOC, untuk menyampaikan laporan dan analisis seputar tren migrasi global dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara anggota PBB.⁹ Meskipun tidak berada secara struktural di bawah ECOSOC, peran IOM dalam mendukung fungsi ECOSOC menjadikannya mitra penting dalam penyusunan kebijakan internasional terkait migrasi dan pembangunan.

Permasalahan ini menimbulkan tantangan yang sangat serius bagi pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya di luar negeri. Oleh karena itu, dalam kasus ini, peran *International Organization for Migration* (IOM) sangat penting dalam membantu pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya. IOM merupakan sebuah organisasi internasional yang memiliki peran untuk mendukung dan melindungi para migrasi supaya aman. Dalam permasalahan WNI di Kamboja, IOM terlibat dalam beberapa aspek, diantaranya identifikasi korban, evakuasi dan

⁸ United Nations Economic and Social Council, *List of Non-Governmental Organizations in Consultative Status with the Economic and Social Council*, <https://www.un.org/ecosoc/en>, diakses pada 3 Juli 2025.

⁹ International Organization for Migration (IOM), *IOM and the United Nations*, <https://www.iom.int/iom-and-united-nations>, diakses pada 3 Juli 2025.

pemulangan, penyediaan bantuan psikososial, hingga program reintegrasi di Indonesia.¹⁰

Dengan meneliti peran IOM secara spesifik, penelitian ini tidak hanya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang dinamika kerja sama internasional dalam isu migrasi dan HAM, tetapi juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan terhadap warganya di luar negeri. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam kajian hubungan internasional, khususnya dalam studi organisasi internasional, perlindungan migran, dan keamanan manusia.

PEMBAHASAN

Fenomena meningkatnya jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat sebagai pekerja ilegal di sektor judi online di Kota Sihanoukville, Kamboja, telah menjadi isu transnasional yang kompleks. Kota ini berkembang pesat menjadi pusat aktivitas perjudian daring yang sebagian besar beroperasi secara ilegal dan melibatkan praktik eksploitasi tenaga kerja, termasuk dari Indonesia. Banyak dari para pekerja ini menjadi korban penipuan perekrutan kerja, pengekangan, hingga kekerasan fisik dan psikologis. Dalam konteks ini, diperlukan intervensi aktor-aktor internasional untuk membantu upaya penanggulangan permasalahan tersebut secara lebih menyeluruh.

International Organization for Migration (IOM) sebagai organisasi internasional yang berfokus pada isu migrasi telah memainkan peran penting dalam merespons krisis pekerja migran ilegal, khususnya terkait kasus eksploitasi WNI di Kamboja. Melalui berbagai program perlindungan, asistensi kemanusiaan, dan kerja sama lintas negara, IOM membantu memfasilitasi pemulangan korban, memberikan pendampingan, serta mengedukasi masyarakat terkait migrasi aman. Peran ini dapat dilihat melalui pendekatan advokasi kebijakan, kerja sama teknis, serta dukungan

¹⁰ Karunia, "Peran International Organization for Migration (Iom) Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2014 (Doctoral Dissertation, Riau University)." 4, no. June (2016): 2016.

logistik dan psikososial bagi para korban yang berhasil diselamatkan dari jaringan kerja paksa tersebut.

Normative Role Membentuk Norma Dan Standar Internasional Terkait Migrasi Aman

Peran normatif merupakan salah satu bentuk kontribusi organisasi internasional dalam menciptakan sistem tata kelola global yang adil dan manusiawi, khususnya dalam isu migrasi. International Organization for Migration (IOM) sebagai badan antarpemerintah telah mengambil peran penting dalam membentuk norma-norma dan standar internasional terkait migrasi yang aman, tertib, dan teratur.¹¹

Sejak resmi menjadi bagian dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2016, peran normatif IOM semakin diperkuat, terutama melalui keterlibatannya dalam penyusunan *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* (GCM), yaitu kesepakatan internasional non-mengikat pertama yang menyeluruh terkait pengelolaan migrasi internasional.¹² Dalam proses tersebut, IOM tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga berperan aktif dalam implementasi prinsip-prinsip GCM di berbagai negara.¹³

Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam GCM menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia para migran, tanpa memandang status legal mereka. Hal ini sejalan dengan pendekatan victim-centered dan prinsip non-kriminalisasi terhadap migran yang menjadi korban eksploitasi.¹⁴ Di sinilah letak pentingnya peran normatif IOM bukan hanya membentuk kerangka konseptual, tetapi juga mendorong negara-negara anggota untuk menerapkan kebijakan yang berbasis pada hak, keadilan, dan perlindungan.

Dalam konteks kasus pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam praktik judi online ilegal di Kota Sihanoukville, Kamboja, IOM menekankan

¹¹ International Organization for Migration, *IOM and the Global Compact for Migration* (Geneva: IOM, 2019), <https://www.iom.int/global-compact-migration>.

¹² United Nations, *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* (New York: United Nations, 2018), <https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact>.

¹³ Khalid Koser, "Introduction: International Migration and Global Governance," *Global Governance* 16, no. 3 (2010): 301–315, <https://www.jstor.org/stable/27800643>.

¹⁴ Martin Geiger and Antoine Pécoud, *The Politics of International Migration Management* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010), <https://link.springer.com/book/10.1057/9780230294882>.

perlunya pendekatan kebijakan yang membedakan antara pelaku dan korban.¹⁵ Migran ilegal seringkali justru merupakan korban dari jaringan perdagangan orang atau perekrutan ilegal, sehingga penanganannya harus melalui pendekatan perlindungan, bukan represif. IOM juga aktif melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada otoritas lokal agar memahami dan menerapkan standar HAM internasional dalam penanganan kasus migrasi.¹⁶

Di samping itu, IOM juga menerbitkan panduan teknis terkait etika perekrutan tenaga kerja migran (*ethical recruitment*), pencegahan perdagangan orang, serta perlindungan terhadap migran rentan.¹⁷ Panduan-panduan tersebut menjadi rujukan penting dalam kebijakan nasional berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam menangani kasus pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi.

Peran normatif IOM tidak hanya terlihat dalam penyusunan dokumen atau advokasi kebijakan, tetapi juga dalam membentuk persepsi global tentang migran. IOM berupaya menegaskan bahwa migran, termasuk yang tidak berdokumen, tetap memiliki hak yang wajib dilindungi.¹⁸ Oleh karena itu, IOM menjadi aktor kunci dalam mendorong transformasi paradigma migrasi, dari sekadar isu keamanan menjadi isu kemanusiaan.

Operational Role Pelaksanaan Teknis seperti Pemulangan, Pelatihan, Dan Reintegrasi

Peran operasional (*operational role*) International Organization for Migration (IOM) merupakan aspek nyata dari pelibatan IOM dalam menangani permasalahan migrasi secara langsung di lapangan. Dalam konteks pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di sektor judi online di Sihanoukville, Kamboja, peran ini sangat krusial karena menyangkut

¹⁵ IOM Indonesia, *Laporan Tahunan IOM Indonesia 2024* (Jakarta: International Organization for Migration, 2024), <https://indonesia.iom.int>.

¹⁶ Alexander Betts, *Global Migration Governance* (Oxford: Oxford University Press, 2011), <https://global.oup.com/academic/product/global-migration-governance-9780199600452>.

¹⁷ Piyasiri Wickramasekara, *Global Labour Recruitment in a Supply Chain Context* (Geneva: International Labour Organization, 2015), https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_377805/lang-en/index.htm.

¹⁸ International Organization for Migration, *International Migration Law No. 34: Migration and the Right to Health* (Geneva: IOM, 2021), <https://publications.iom.int/books/international-migration-law-ndeg34-migration-and-right-health>.

penyelamatan dan pemulangan korban, serta memastikan proses reintegrasi berjalan dengan layak dan berkelanjutan.

IOM menjalankan program *Assisted Voluntary Return and Reintegration* (AVRR) sebagai mekanisme utama dalam pelaksanaan pemulangan sukarela dan reintegrasi bagi para korban perdagangan manusia atau migrasi tidak aman. Program ini dirancang untuk memberikan solusi manusiawi kepada migran yang ingin kembali ke negara asalnya secara sukarela, termasuk mereka yang berada dalam situasi rentan seperti korban eksploitasi kerja dan perdagangan manusia. Pelaksanaan AVRR melibatkan sejumlah tahapan teknis, mulai dari identifikasi korban, penyediaan dokumen perjalanan darurat, penyelenggaraan transportasi yang aman, hingga dukungan pasca-kepulungan berupa pelatihan, bantuan usaha kecil, dan pemulihan psikososial.

Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah WNI yang dieksploitasi di industri judi online ilegal di Kamboja mendorong IOM untuk memperkuat keterlibatannya di wilayah tersebut. Menurut laporan resmi IOM, ratusan WNI telah difasilitasi untuk kembali ke Indonesia dari Kamboja, terutama dari kota Sihanoukville, yang dikenal sebagai pusat operasi kasino daring ilegal yang sering merekrut pekerja migran secara tipu daya. Pada tahun 2023 saja, IOM Indonesia mencatat telah memfasilitasi pemulangan lebih dari 340 WNI dari Kamboja, mayoritas adalah korban penipuan pekerjaan dan eksploitasi kerja paksa di perusahaan judi online.¹⁹

IOM bekerja sama erat dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, KBRI Phnom Penh, dan otoritas imigrasi Kamboja untuk memastikan proses repatriasi dilakukan sesuai dengan prinsip keamanan, sukarela, dan bermartabat. Selain memfasilitasi perjalanan dan keperluan administratif, IOM juga menyediakan program reintegrasi di Indonesia berupa pelatihan keterampilan kerja, penyuluhan kewirausahaan, dan

¹⁹ International Organization for Migration (IOM) Indonesia, *Annual Report 2023*, accessed July 28, 2025, <https://indonesia.iom.int/resources/iom-indonesia-annual-report-2023>.

pendampingan sosial.²⁰ Pelatihan ini menjadi penting agar para korban tidak kembali terjebak dalam siklus migrasi tidak aman. Fokus pelatihan sering kali diarahkan pada pengembangan usaha mikro atau keterampilan berbasis lokal seperti menjahit, pengolahan makanan, atau pengembangan usaha berbasis digital.²¹

Tak hanya itu, IOM juga menyediakan layanan kesehatan dan psikososial, terutama bagi korban yang mengalami trauma berat akibat eksploitasi. Hal ini dilakukan bekerja sama dengan LSM lokal, rumah sakit rujukan, dan dinas sosial di daerah asal korban. Proses pemulangan ini tidak sekadar “memulangkan”, melainkan juga memastikan bahwa korban mendapatkan akses ke layanan yang mampu mengembalikan martabat dan produktivitas mereka secara jangka panjang.

Peran operasional ini mencerminkan salah satu mandat utama IOM yaitu menyediakan respon langsung berbasis lapangan yang praktis dan bersifat jangka panjang. Pelaksanaan teknis ini juga mengukuhkan posisi IOM bukan hanya sebagai organisasi pembentuk norma, tetapi juga sebagai aktor lapangan yang melakukan penyelamatan nyata terhadap korban migrasi tidak aman.

Advocacy Role Advokasi Perlindungan Hak Migran Dan Pencegahan Perdagangan Orang

Dalam kasus pekerja migran ilegal Indonesia yang terjebak dalam praktik kerja paksa dan eksploitasi di sektor judi online di Sihanoukville, Kamboja, peran advokasi dari International Organization for Migration (IOM) menjadi sangat penting. IOM tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai aktor advokasi yang berupaya mendorong perlindungan hak-hak migran melalui berbagai mekanisme, baik formal maupun informal.

²⁰ International Organization for Migration (IOM), *Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR)*, accessed July 28, 2025, <https://www.iom.int/assisted-voluntary-return-and-reintegration-avrr>.

²¹ IOM, *AVRR: Supporting Sustainable Reintegration*, 2021, accessed July 28, 2025, <https://publications.iom.int/books/avrr-supporting-sustainable-reintegration>.

IOM Indonesia aktif mengadvokasi isu pekerja migran ilegal, khususnya WNI yang menjadi korban eksploitasi di luar negeri, melalui kerja sama strategis dengan BP2MI, Kementerian Luar Negeri RI, dan Kementerian Ketenagakerjaan. IOM mendorong pembentukan protokol perlindungan dan pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang lebih komprehensif, termasuk untuk kasus pekerja di sektor digital seperti judi online.²² Sebagai bagian dari advokasi, IOM mendesak perlunya peningkatan regulasi dan pengawasan terhadap agen perekrut tenaga kerja ilegal, yang kerap menggunakan jalur tidak resmi dan menyesatkan WNI dengan janji pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Upaya ini diwujudkan melalui pelatihan kepada aparat desa, sosialisasi di daerah kantong migran serta penguatan kapasitas penyuluh migrasi.²³

Di Kamboja, IOM bekerja sama dengan otoritas lokal dan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) untuk mendorong investigasi kasus eksploitasi tenaga kerja di sektor judi online yang melibatkan WNI. Melalui pendekatan diplomatik dan teknis, IOM mendorong adanya akses konsuler, bantuan hukum, dan perlakuan manusiawi terhadap korban. IOM juga mengadvokasi agar korban tidak dikriminalisasi atas dasar status keimigrasian ilegal mereka.²⁴

IOM menjadi pelopor dalam menyuarakan pentingnya migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi melalui dokumen normatif seperti Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). Dalam konteks kasus Sihanoukville, GCM menjadi referensi normatif bagi IOM untuk mendesak negara-negara agar melindungi migran dari eksploitasi digital lintas negara.²⁵

IOM Indonesia meluncurkan kampanye daring untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai risiko migrasi tidak aman dan perdagangan

²² BP2MI, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Korban TPPO*, diakses 28 Juli 2025, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/3692>.

²³ IOM Indonesia, *IOM Strengthens Community Awareness on Human Trafficking*, diakses 28 Juli 2025, <https://indonesia.iom.int/news/iom-strengthens-community-awareness-human-trafficking>.

²⁴ UNODC, *Combating Human Trafficking in Southeast Asia*, diakses 28 Juli 2025, <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/topics/trafficking-in-persons.html>.

²⁵ IOM, *IOM and the Global Compact for Migration*, diakses 28 Juli 2025, <https://www.iom.int/global-compact-migration>.

orang. Kampanye ini menyasar platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, yang kerap digunakan pelaku perdagangan orang untuk menjaring korban. Materi kampanye tersebut menjelaskan modus operandi perusahaan judi online di Kamboja yang memperkerjakan WNI secara ilegal dan eksploitatif.²⁶

Hasil nyata dari peran advokasi IOM dapat dilihat dalam beberapa keberhasilan seperti Pemulangan dan perlindungan ratusan WNI dari Sihanoukville, Terbukanya akses bantuan hukum dan layanan psikososial bagi korban, Meningkatnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap isu pekerja migran di sektor daring ilegal, Peningkatan koordinasi bilateral antara Indonesia dan Kamboja terkait penanganan TPPO.

Catalytic Role Mendorong Kerja Sama Multilateral dan Pendanaan Internasional

Peran katalitik dari International Organization for Migration (IOM) berfokus pada kemampuannya untuk menginisiasi, mendorong, dan memfasilitasi kolaborasi multilateral antarnegara dan antarorganisasi dalam merespons isu-isu migrasi internasional yang kompleks, seperti kasus pekerja migran ilegal Indonesia yang terjatuh dalam sindikat judi online di Kamboja.

MENDORONG KOLABORASI BILATERAL DAN MULTILATERAL

Dalam konteks eksploitasi WNI di Sihanoukville, IOM berperan sebagai katalisator yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kamboja, organisasi internasional seperti UNODC dan UN Women, serta LSM lokal dan regional untuk membangun sistem perlindungan yang terkoordinasi. Misalnya, IOM memfasilitasi pertemuan lintas negara dan penguatan mekanisme bilateral dalam bentuk perjanjian kerja sama, nota kesepahaman, serta gugus tugas regional untuk penanganan kasus TPPO dan migrasi tidak aman.²⁷

²⁶ IOM Indonesia, *Digital Campaign to Prevent Human Trafficking and Unsafe Migration*, diakses 28 Juli 2025, <https://indonesia.iom.int/news/iom-launches-digital-campaign-prevent-human-trafficking-and-unsafe-migration>.

²⁷ IOM Indonesia, *IOM Facilitates Cooperation Between Indonesia and Cambodia on Migrant Protection*, diakses 28 Juli 2025, <https://indonesia.iom.int/news/iom-facilitates-cooperation-between-indonesia-and-cambodia-migrant-protection>

Selain itu, Dalam konteks penanganan kasus eksploitasi WNI di Sihanoukville, keberadaan LSM lokal di Kamboja memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kerja IOM. LSM lokal yang dimaksud adalah organisasi non-pemerintah yang berbasis di wilayah setempat dan memiliki fokus pada isu-isu hak asasi manusia, perlindungan pekerja migran, pencegahan perdagangan orang, serta pemulihan korban. Berbeda dengan organisasi internasional yang memiliki cakupan kerja luas, LSM lokal memiliki keunggulan pada pemahaman budaya, bahasa, dan dinamika sosial di tingkat komunitas, sehingga dapat memberikan bantuan langsung secara cepat dan tepat sasaran.²⁸

Beberapa contoh LSM lokal yang relevan antara lain LICADHO (Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights) yang berfokus pada advokasi hak asasi manusia dan pendampingan hukum bagi korban kekerasan serta perdagangan orang.²⁹ Ada pula Cambodian Women's Crisis Center (CWCC) yang memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dan perdagangan orang melalui penyediaan shelter, layanan konseling, dan program reintegrasi sosial-ekonomi.³⁰ Selain itu, Chab Dai Coalition bergerak melalui jejaring komunitas dan gereja untuk mencegah perdagangan manusia serta mendukung pemulihan korban,³¹ sedangkan ADHOC (*Cambodian Human Rights and Development Association*) berperan dalam investigasi kasus, advokasi kebijakan, dan bantuan hukum bagi korban migrasi paksa maupun eksploitasi.³²

²⁸ International Organization for Migration (IOM). *IOM Facilitates Cooperation Between Indonesia and Cambodia to Combat Trafficking in Persons*. Phnom Penh: IOM Cambodia, 2023. Diakses 11 Agustus 2025. <https://indonesia.iom.int/news/iom-facilitates-cooperation-between-indonesia-and-cambodia-combat-trafficking-persons>.

²⁹ LICADHO, *About LICADHO* (Phnom Penh: Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights, 2024), diakses 11 Agustus 2025, <https://www.licadho-cambodia.org>.

³⁰ Cambodian Women's Crisis Center (CWCC), *Programs and Services* (Phnom Penh: CWCC, 2024), diakses 11 Agustus 2025, <https://www.cwcc.org.kh>.

³¹ Chab Dai Coalition, *Our Work: Ending Human Trafficking and Sexual Exploitation* (Phnom Penh: Chab Dai, 2024), diakses 11 Agustus 2025, <https://www.chabdai.org>.

³² ADHOC, *About Us* (Phnom Penh: Cambodian Human Rights and Development Association, 2024), diakses 11 Agustus 2025, <https://www.adhoc-cambodia.org>.

Dalam kolaborasinya, IOM bekerja sama dengan LSM-LSM tersebut untuk membangun sistem perlindungan yang terkoordinasi. LSM lokal berperan dalam deteksi dini korban WNI di lapangan, penyediaan rumah aman, bantuan kesehatan, pendampingan hukum selama proses persidangan, serta persiapan reintegrasi korban ke Indonesia.³³ Melalui kemitraan ini, IOM dapat menjangkau wilayah dan kelompok korban yang sulit diakses, memastikan bahwa proses penyelamatan dan pemulihan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial-budaya setempat. Dengan demikian, sinergi antara IOM dan LSM lokal menjadi salah satu kunci keberhasilan upaya penanggulangan eksploitasi WNI di Sihanoukville.

MENDORONG PENDANAAN BERSAMA DAN MOBILISASI SUMBER DAYA

Peran katalitik IOM juga tampak dalam kemampuannya menarik pendanaan dari berbagai sumber, termasuk donor internasional seperti Uni Eropa, USAID, dan Australia Aid, untuk mendukung proyek pemulangan, reintegrasi, dan edukasi bagi korban perdagangan orang. Di Indonesia, IOM bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI dan BP2MI dalam mengimplementasikan program Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) yang dibiayai sebagian oleh mitra internasional.³⁴

Pada kasus pekerja migran ilegal di Kamboja, IOM menggunakan pendekatan multi-donor program yang memungkinkan dukungan finansial dan teknis dari berbagai pihak untuk pemulangan korban, penguatan sistem migrasi nasional, serta pelatihan pascareintegrasi. Ini menciptakan keberlanjutan upaya dan mengurangi beban finansial pemerintah lokal.³⁵

³³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Strengthening Regional Cooperation to Combat Trafficking in Persons in Southeast Asia* (Bangkok: UNODC, 2024).

³⁴ IOM, Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR), diakses 28 Juli 2025, <https://www.iom.int/assisted-voluntary-return-and-reintegration-avrr>

³⁵ IOM Indonesia, Multi-Stakeholder Response to Victims of Human Trafficking, diakses 28 Juli 2025, <https://indonesia.iom.int/news/iom-and-partners-enhance-multi-stakeholder-response-victims-human-trafficking>

MENGINISIASI PLATFORM REGIONAL DAN GLOBAL

IOM juga aktif dalam pembentukan dan penguatan kerangka kerja regional seperti Bali Process dan Colombo Process, yang menjadi wadah koordinasi antarnegara Asia-Pasifik dalam menangani migrasi tidak teratur, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.³⁶ Bali Process dan Colombo Process adalah dua forum kerja sama regional yang penting di kawasan Asia-Pasifik dan Asia Selatan dalam menangani isu-isu migrasi tidak teratur, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.³⁷ Keduanya berfungsi sebagai wadah koordinasi antarnegara untuk memperkuat kerja sama, berbagi informasi, dan membangun kapasitas dalam menangani tantangan migrasi lintas negara secara lebih terkoordinasi dan manusiawi

Melalui forum-forum ini, IOM mendorong keterlibatan negara-negara pengirim, transit, dan penerima untuk bekerja sama dalam berbagi informasi, membangun mekanisme deteksi dini, dan menyusun strategi bersama dalam menangani kasus seperti eksploitasi di sektor judi online.

MENINGKATKAN KAPASITAS NEGARA MITRA

Peran katalitik IOM juga terlihat dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga-lembaga di negara mitra. Di Kamboja, IOM bekerja sama dengan pemerintah dan LSM lokal untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan merespons kasus perdagangan manusia yang melibatkan migran asing. Selain itu, IOM juga mendorong integrasi data migrasi dan identifikasi korban berbasis gender dan usia untuk meningkatkan efektivitas penanganan.³⁸

³⁶ The Bali Process, About the Bali Process, diakses 28 Juli 2025, <https://www.baliprocess.net/>

³⁷ Ahmad Khoirul Umam and Shella Putri, "Upaya Australia Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Kawasan Pasifik Selatan Melalui Kerja Sama Forum Bali Proses (2013 – 2019)," *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2022): 88–103, <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v5i2.7209>.

³⁸ IOM Cambodia, Enhancing Law Enforcement Capacity in Addressing Human Trafficking, diakses 28 Juli 2025, <https://cambodia.iom.int/news/iom-works-improve-law-enforcement-capacity-human-trafficking>

KONTRIBUSI TERHADAP KEBIJAKAN DAN STANDAR INTERNASIONAL

Melalui keterlibatannya dalam penyusunan Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM), IOM tidak hanya membentuk norma internasional (normative role), tetapi juga mendorong implementasi dan komitmen negara-negara terhadap kerja sama internasional yang lebih aktif. Dalam konteks ini, GCM menjadi instrumen penting yang mendorong negara-negara seperti Indonesia dan Kamboja untuk bekerja sama dalam memerangi eksploitasi migran digital.³⁹

Dari analisis yang telah disajikan dalam bab ini, dapat disimpulkan bahwa IOM memainkan peran yang signifikan dalam penanggulangan pekerja migran ilegal Indonesia di Kamboja, khususnya melalui pendekatan advokasi, asistensi kemanusiaan, serta mendorong kerja sama multilateral antara negara asal dan negara tujuan. IOM tidak hanya berkontribusi dalam proses pemulihan dan reintegrasi korban, tetapi juga berupaya membangun sistem perlindungan yang lebih komprehensif melalui kampanye kesadaran, pelatihan kapasitas, dan koordinasi dengan aktor-aktor kunci. Peran tersebut menunjukkan bahwa kerja sama internasional dan keterlibatan organisasi internasional menjadi elemen krusial dalam menghadapi kompleksitas perdagangan orang dan migrasi tidak aman. Bab selanjutnya akan menyajikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam penanggulangan pekerja migran ilegal Indonesia di Kamboja, khususnya pada kasus penempatan WNI di sektor judi online di Kota Sihanoukville, dapat disimpulkan bahwa IOM memegang peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia. Permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran ilegal Indonesia di Kamboja

³⁹ IOM, Global Compact for Migration, diakses 28 Juli 2025, <https://www.iom.int/global-compact-migration>

tergolong kompleks dan serius, di mana sebagian besar korban mengalami bentuk-bentuk eksploitasi seperti pengekangan, kekerasan fisik dan psikologis, perampasan dokumen identitas, jam kerja berlebihan, hingga ancaman keselamatan diri. Kondisi ini umumnya berawal dari proses rekrutmen tidak resmi melalui media sosial yang menawarkan pekerjaan bergaji tinggi, yang pada akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam jaringan perdagangan manusia.

Dalam merespons situasi tersebut, IOM hadir sebagai organisasi internasional yang memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus mendorong penyelesaian jangka panjang. Program yang dijalankan meliputi identifikasi dan pendataan korban, fasilitasi repatriasi atau pemulangan ke tanah air, serta penyediaan bantuan pemulihan psikososial dan reintegrasi sosial. IOM juga berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya migrasi ilegal dan perdagangan manusia, bekerja sama dengan lembaga pemerintah Indonesia seperti BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, serta menjalin kolaborasi dengan mitra internasional. Peran IOM tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga normatif dalam mendorong penguatan kebijakan dan koordinasi lintas negara untuk menciptakan tata kelola migrasi yang aman.

Efektivitas peran IOM tercermin dari kemampuannya menjembatani kepentingan negara pengirim dan negara tujuan melalui pendekatan advokatif dan katalitik. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan akses ke wilayah eksploitasi yang dijaga ketat oleh sindikat kriminal dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang. Oleh karena itu, penguatan peran IOM memerlukan dukungan politik, kebijakan yang terintegrasi, dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini menegaskan bahwa organisasi internasional seperti IOM tidak hanya menjadi pelaksana teknis bantuan kemanusiaan, tetapi juga aktor penting dalam mendorong terciptanya sistem migrasi yang legal, terstruktur, dan manusiawi, sehingga potensi eksploitasi terhadap WNI di masa depan dapat diminimalkan.

REFERENSI

ADHOC. (2024). *About us*. Cambodian Human Rights and Development Association. <https://www.adhoc-cambodia.org>

Umam, A. K., & Putri, S. (2022). Upaya Australia dalam menangani masalah perdagangan manusia di kawasan Pasifik Selatan melalui kerja sama forum Bali Proses (2013–2019). *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 88–103. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v5i2.7209>

Betts, A. (2011). *Global migration governance*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/global-migration-governance-9780199600452>

BP2MI. (2025, July 28). *Perlindungan pekerja migran Indonesia korban TPPO*. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/3692>

Cambodian Women's Crisis Center. (2024). *Programs and services*. CWCC. <https://www.cwcc.org.kh>

Chab Dai Coalition. (2024). *Our work: Ending human trafficking and sexual exploitation*. <https://www.chabdai.org>

International Organization for Migration. (n.d.-a). *Assisted voluntary return and reintegration (AVRR)*. <https://www.iom.int/assisted-voluntary-return-and-reintegration-avrr>

International Organization for Migration. (2021). *AVRR: Supporting sustainable reintegration*. <https://publications.iom.int/books/avrr-supporting-sustainable-reintegration>

International Organization for Migration. (n.d.-b). *Global compact for migration*. <https://www.iom.int/global-compact-migration>

International Organization for Migration. (2019). *IOM and the global compact for migration*. IOM. <https://www.iom.int/global-compact-migration>

IOM Cambodia. (2025, July 28). *Enhancing law enforcement capacity in addressing human trafficking*. <https://cambodia.iom.int/news/iom-works-improve-law-enforcement-capacity-human-trafficking>

IOM Indonesia. (2025, July 28). *Digital campaign to prevent human trafficking and unsafe migration*. <https://indonesia.iom.int/news/iom-launches-digital-campaign-prevent-human-trafficking-and-unsafe-migration>

IOM Indonesia. (2025, July 28). *IOM facilitates cooperation between Indonesia and Cambodia on migrant protection*. <https://indonesia.iom.int/news/iom-facilitates-cooperation-between-indonesia-and-cambodia-migrant-protection>

IOM Indonesia. (2025, July 28). *IOM strengthens community awareness on human trafficking*. <https://indonesia.iom.int/news/iom-strengthens-community-awareness-human-trafficking>

IOM Indonesia. (2024). *Laporan tahunan IOM Indonesia 2024*. IOM. <https://indonesia.iom.int>

IOM Indonesia. (2025, July 28). *Multi-stakeholder response to victims of human trafficking*. <https://indonesia.iom.int/news/iom-and-partners-enhance-multi-stakeholder-response-victims-human-trafficking>

International Organization for Migration. (n.d.-c). *About IOM*. <https://www.iom.int/about-iom>

International Organization for Migration. (n.d.-d). *IOM and the United Nations*. <https://www.iom.int/iom-and-united-nations>

International Organization for Migration. (2023). *IOM facilitates cooperation between Indonesia and Cambodia to combat trafficking in persons*. IOM Cambodia. <https://indonesia.iom.int/news/iom-facilitates-cooperation-between-indonesia-and-cambodia-combat-trafficking-persons>

International Organization for Migration. (2021). *International migration law No. 34: Migration and the right to health*. IOM. <https://publications.iom.int/books/international-migration-law-ndeg34-migration-and-right-health>

Jesica Wulan Oroh. (2023). Peran BP2MI dalam pencegahan penempatan pekerja migran ilegal melalui program Satuan Tugas Pemberantasan Pekerja Migran Ilegal Indonesia di era Covid-19. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 81–94.

Karunia. (2016). Peran International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia tahun 2010–2014 (Doctoral dissertation, Riau University).

Koser, K. (2010). Introduction: International migration and global governance. *Global Governance*, 16(3), 301–315. <https://www.jstor.org/stable/27800643>

LICADHO. (2024). *About LICADHO*. Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights. <https://www.licadho-cambodia.org>

Geiger, M., & Pécoud, A. (2010). *The politics of international migration management*. Palgrave Macmillan. <https://link.springer.com/book/10.1057/9780230294882>

Nhek, S. (2024). PM vows to combat human trafficking, warns against fake news. <https://cambodianess.com/article/pm-vows-to-combat-human-trafficking-warns-against-fake-news>

Wickramasekara, P. (2015). *Global labour recruitment in a supply chain context*. International Labour Organization. https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_377805/lang-en/index.htm

Putri Injilia Wangko, et al. (2025). Peran Imigrasi Manado dalam mencegah pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural ke Kamboja. *Jurnal* 17(3), 108–118.

Sugiyono, A. F., & Runturambi, A. J. S. (2024). Memerangi cybercrime dan TPPO pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural ke Kamboja. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 7(1), 2–12. <https://10.0.205.137/jikk.v7i1.544>

The Bali Process. (n.d.). *About the Bali Process*. <https://www.baliprocess.net>

United Nations. (2018). *Global compact for safe, orderly and regular migration*. <https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact>

United Nations. (2016, September 19). UN and IOM sign historic agreement. *UN News*. <https://news.un.org/en/story/2016/09/539722>

United Nations Economic and Social Council. (n.d.). *List of non-governmental organizations in consultative status with the Economic and Social Council*. <https://www.un.org/ecosoc/en>

United Nations General Assembly. (2016). *Resolution adopted by the General Assembly on 25 July 2016: Agreement concerning the relationship between the United Nations and the International Organization for Migration (A/RES/70/296)*. <https://digitallibrary.un.org/record/837208>

United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). *Combatting human trafficking in Southeast Asia*. <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/topics/trafficking-in-persons.html>

United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *Strengthening regional cooperation to combat trafficking in persons in Southeast Asia*. UNODC.